

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rita Rosita¹, Syafira Mariana^{2*}, Fanji Farman³, Tita Kartika⁴

^{1,2,4}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April, Indonesia

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia

*E-mail: syafira.feb@unsap.ac.id

Submitted: 12 December 2025

Accepted : 14 January 2026

Published: 02 Februari 2026

ABSTRAK

Pemerintah dituntut untuk mencapai kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam menjelaskan program kerjanya, pemerintah memerlukan anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan rencana kerja. Perencanaan anggaran merupakan proses penetapan alokasi anggaran dalam periode tertentu untuk mendukung pelaksanaan program kerja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel nonprobability melalui metode purposive sampling. Teknik analisis yang diterapkan melalui analisis linear sederhana. Analisis koefisien determinasi, serta uji hipotesis. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Temuan ini ditunjukkan oleh nilai t tabel pada taraf signifikansi 2.848 yang lebih tinggi dibandingkan dengan t table pada taraf signifikansi 5% sebesar 2.018, serta nilai signifikansi 0.007 yang lebih kecil dari 0.05. selanjutnya, hasil dari uji determinasi menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memberikan kontribusi sebesar 14,2% terhadap akuntabilitas kinerja, sementara 85,8% sisanya dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Kata Kunci : perencanaan anggaran, akuntabilitas kinerja

ABSTRACT

The government is required to deliver performance outcomes that serve the public interest by fulfilling its vision and mission. To carry out its performance programs, the government needs a budget to support its work plans. Budget planning refers to the process of determining the allocation of funds within a specific period to execute these programs. This study aims to examine the influence of Budget Planning on the Performance Accountability of the Regional Financial and Asset Agency of Sumedang Regency. This research employs a quantitative approach, using a non-probability sampling technique with purposive sampling. The analytical methods used include Simple Linear Regression Analysis, the Coefficient of Determination, and Hypothesis Testing. The data collected and the results of the analysis indicate that Budget Planning has a positive and significant effect on the Performance Accountability of the Regional Financial and Asset Agency of Sumedang Regency. This is demonstrated by the t-value of 2.848 for Budget Planning, compared with a t-table value of 2.018 at a 5% significance level, showing that the t-value exceeds the t-table value. Furthermore, the significance value of 0.007 is below 0.05. The determination test results show that budget planning contributes 14.2% to the performance accountability of the agency, while the remaining 85.8% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: budget planning, performance accountability

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dari suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang dinamakan sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). (Rusdiana, A. and Nasihudin 2018).

Dalam buku pengukuran kinerja sektor publik teori dan aplikasi oleh (Hartati et al. 2022). (Peraturan Presiden (Perpres) 2014) memberikan arti bahwa akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang akan dicapainya. Dalam hal ini pelaporan kinerja dapat mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran dari instansi pemerintah.

Fungsi dari pemerintah daerah ini diatur dalam (Pemerintah Pusat 2004) yaitu, "Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah". Dalam (Pemerintah Pusat 2004) tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana telah membawa perubahan antara hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah ialah seluruh kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Kegiatan perencanaan ini dituangkan dalam penyusunan APBD dan pada kegiatannya memerlukan kinerja dari pemerintah daerah yang dimulai dari penentuan program sehingga tersusun suatu anggaran. (Fadhilatunnisa, Suwondo, dan Novianty 2021).

Dalam hal ini Badan Proses perencanaan merupakan salah satu tahap penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana mestinya akan menimbulkan hambatan bagi perangkat daerah itu sendiri. Akibat dari perencanaan dan penganggaran yang kurang baik tersebut, menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak maksimal, keduanya akan sangat berdampak pada kinerja pada organisasi perangkat daerah. Maka ketepatan dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan anggaran belanja diperlukan untuk mendukung program Kepala Daerah untuk mencapai visi dan misi. (Fadhilatunnisa et al. 2021).

Salah satu SKPD yang membantu kepala daerah yang bertugas membantu Bupati Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan fungsi dan urusan penunjang pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini berisikan mengenai informasi bagaimana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan pelaksanaan program, kegiatan, dan bagaimana pencapaiannya terhadap sasarnya. Adapun pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu :

Tabel 1. Pengukuran Kinerja SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah	1 Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	92,54%
		2 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	99,01%
		3 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98,56%
2.		1 Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	96,37%

No	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah	2 Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	98,18%
		3 Terjadinya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	97,58%
3.	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	1 Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	96,53%

Sumber : LKIP BKAD Kabupaten Sumedang 2023

Dilihat dari tabel 1 tentang pengukuran kinerja SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 atas sasaran indikator yang tidak mencapai 100% , artinya pengukuran Kinerja SKPD Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sumedang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023

No	program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	835,390,360	762,079,340	91,23	73,311,020
2.	Program pengelolaan keuangan daerah	4,913,523,030	4,789,493,955	97,47	124,029,075
3.	Program pengelolaan barang milik daerah	2,711,360,000	2,069,249,293	76,32	642,110,707
	Jumlah	8.460.273.390	7.620.822.588	90,08	839.450.802

Sumber : LKIP BKAD Kabupaten Sumedang 2023

Pada tabel 2 tentang alokasi anggaran, realisasi anggaran tidak ada yang mencapai 100%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2023 terdapat kesenjangan antar perencanaan anggaran dan realisasi anggaran serta indikator sasaran yang tidak tercapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Perencanaan anggaran ialah jumlah yang ditetapkan untuk menunjang berjalanya kegiatan atau program, dengan implementasi kegiatan program akan memenuhi indikator-indikator sasaran.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai dampak perencanaan anggaran atas akuntabilitas kinerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Budi dan Ghoidah 2022) menunjukkan hasil Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Annisa, Ramdhan, dan Suardi 2022) menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai. Sedangkan studi yang dilakukan oleh (Lirda, Haryati, dan Nancy 2023) menunjukkan Implementasi Anggaran berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Perencanaan Anggaran untuk mengukur Kinerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah .

Perencanaan semakin baik maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, dengan begitu sebaliknya apabila perencanaan rendah maka akuntabilitas kinerja juga rendah. Hal itu terjadi karena penerapan perencanaan masih belum optimal yang ditandai dengan tanggapan responden pada indikator kebijakan yang masih rendah. Studi ini menggunakan sampel pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. (Sugiyono 2022) mengemukakan bahwa “Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, dalam pengumpulan data nya menggunakan instrument penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk pengujian hipotesis”.

Sedangkan dalam pengambilan data nya, peneliti menggunakan metode survey, dimana metode survey ini digunakan untuk mendapatkan data pada masa yang lampau ataupun masa kini, tentang keyakinan pendapat, karakteristik, perilaku hubungan antar variabel dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologi dari sebuah sampel yang di ambil dari populasi, dalam hal ini Teknik kumpulan data di ambil dari wawancara dan kuesioner. (Sugiyono 2022).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang yang berjumlah 88 orang pegawai.

Tabel 3. Populasi Penelitian

No	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1	Bidang Anggaran	12
2	Bidang Aset	18
3	Bidang Akuntansi	14
4	Pembendaharaan	16
5	Sekretariat	28
Jumlah		88

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Non Probability Sampling dengan metode Sampling Purposive. Adapun kriteria yang dipakai untuk memenuhi sampelnya ialah pegawai terkait yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang anggaran dan pegawai yang bersangkutan memahami bagaimana penerapan perencanaan anggaran. Sehingga menghasilkan sampel penelitian sebanyak 44 orang pegawai.

Tabel 4. Sampel Penelitian

No	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1	Bidang Anggaran	12
2	Bidang Akuntansi	14
3	Bidang Aset	18
Jumlah		44

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Sumedang menunjukkan Hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	34.879	6.930		5.033	.000
	Perencanaan Anggaran	.340	.119	.402	2.848	.007

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Data hasil olahan peneliti dengan SPSS, 2025

Persamaan regresi yang menjelaskan perencanaan anggaran (X) dan akuntabilitas kinerja (Y) berdasarkan berdasarkan koefisien regresi pada tabel 4.44 adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 34.879 + 0,340X$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai a sebesar 34.879 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel akuntabilitas kinerja (Y) belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel perencanaan anggaran (X). Jika variabel independen tidak ada maka akuntabilitas kinerja tidak mengalami perubahan.
- b. Nilai b1 yaitu nilai koefisien regresi perencanaan anggaran (X) sebesar 0,340, menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel perencanaan anggaran maka akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja sebesar 0,340, dengan asumsi bahwa variabel-variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Setelah itu melakukan uji koefisien determinasi Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X (perencanaan anggaran) terhadap variabel Y (akuntabilitas kinerja), yaitu dengan melihat nilai koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.402 ^a	.162	.142	3.180
a. Predictors: (Constant), Perencanaan Anggaran				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja				

Sumber : Data hasil olahan peneliti dengan SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R. Square sebesar 0,142 atau 14,2%. Hal ini berarti 14,2% variasi dari akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu perencanaan anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 85,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Sehingga menghasilkan uji Uji Parsial (Uji T), ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dapat menerangkan variabel dependen.

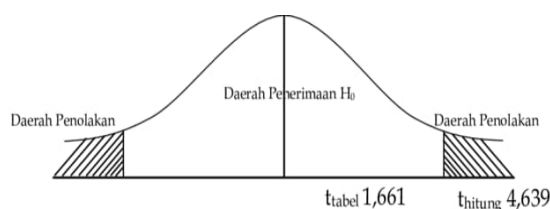
Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	34.879	6.930		5.033	.000
	Perencanaan Anggaran	.340	.119	.402	2.848	.007

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Data hasil olahan peneliti dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.48 di atas maka diperoleh hasil: Nilai signifikansi dari variabel perencanaan anggaran (X) adalah $0,011 < 0.05$, dan nilai thitung $2.848 > t_{tabel} 2.018$ maka diterima. Hal ini H1 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y).



Gambar 1. Kurva Hasil Dua Arah Perencanaan Anggaran (X) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berdasarkan kurva diatas dapat disimpulkan bahwa Ho ada di daerah penolakan atau H1 diterima, maka hal tersebut berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel perencanaan anggaran (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden mengenai variabel perencanaan anggaran (X) dengan skor total sebesar 2.478 berada pada jarak interval 2.402,4 – 2.860. Secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik, artinya perencanaan anggaran yang dibuat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan harapan.

Begitupun dengan hasil dari tanggapan responden mengenai akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Y) dengan skor total 2.305 yang berada pada jarak interval 2.217,6 – 2.640. Secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik, artinya kinerja di Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang melakukan kinerja dengan sangat baik sesuai dengan harapan.

Akuntabilitas Kinerja suatu unit kerja dapat diukur melalui kualitas dari pekerjaan yang baik, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan inisiatif kerja serta pencapaian target. Dengan demikian, pengungkapan kinerja akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memerhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja aparat merupakan hasil kerja keras yang telah dicapai baik atasan maupun bawahan dalam suatu organisasi. Para aparat yang terlibat dalam proses penganggaran diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Menurut (Mansur, Susilawati, dan Suryaman 2023) mengemukakan bahwa, kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi.

Kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai dalam organisasi mulai dari organisasi pemerintahan, perusahaan, dan perguruan tinggi. Meningkatnya kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, terdapat beberapa faktor yang turut menentukan suatu organisasi mencapai kesuksesan dalam meningkatkan kinerja. (Peraturan Pemerintah (PP) 2006) tentang kinerja instansi pemerintah, mendefinisikan kinerja sebagai suatu keluaran atau hasil dari program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran dan peran anggaran sebagai pengukur kinerja memiliki kaitan yang cukup kuat. Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai perencanaan dan kriteria dari kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja aparat pemerintah.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran adalah $0,011 < 0,05$, dan nilai thitung $2,848 > t_{tabel} 2,018$ maka diterima diperoleh hasil pengujian H_1 diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja memperoleh nilai r^2 sebesar 0,142 atau 14,2% dapat diartikan bahwa variabel perencanaan anggaran memberikan pengaruh cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti semakin baiknya perencanaan anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang ada pada BKAD.

Dengan adanya pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah hal ini menandakan bahwa semakin bagus perencanaan anggaran yang dilakukan maka akan semakin bagus pula kinerja yang akan dihasilkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang memiliki perencanaan anggaran yang baik sehingga kinerja yang dihasilkan sangat bagus sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tanggapan dari responden berdasarkan variabel perencanaan (X) menghasilkan nilai sebesar 2.478 dimana jarak interval nya adalah 2.402,4 sampai dengan 2.860. secara keseluruhan yang di nilai berdasarkan indikator yang berbeda pada setiap kategori sangat baik, artinya perencanaan anggaran yang telah dibuat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan harapan.
2. Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Hasil tanggapan dari responden mengenai akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Y) dengan total skor 2.305 yang berada dalam jarak interval 2.217,6 sampai 2.640 . secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator yang ada pada kategori sangat baik, dapat di artikan bahwa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sudah melakukan kinerja dengan sangat baik.
3. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran adalah $0,011 < 0,05$, dan nilai thitung $2,848 > t_{tabel} 2,018$ maka diterima dan diperoleh hasil pengujian H_1 diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Perencanaan anggaran terhadap

akuntabilitas kinerja memperoleh nilai r^2 sebesar 0,142 atau 14,2% dapat diartikan bahwa variabel perencanaan anggaran memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti semakin baiknya perencanaan anggaran maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang ada di BKAD. Dengan adanya pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah menandakan bahwa semakin bagus perencanaan anggaran yang dilakukan maka akan semakin bagus kinerja yang akan dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Abid Ramdhan, dan Ahmad Suardi. 2022. "PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR BPKAD KOTA PALOPO." *JURNAL KEUNIS (Keuangan dan Bisnis)* Vol. 10, N:13–21. doi:<https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3118>.
- Budi, Inta, dan Ummi Ghoidah. 2022. "Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja." *Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting* Volume 2 N:172–91. doi:<https://doi.org/10.34010/jemba.v2i2.8539>.
- Fadhilatunnisa, Ajeng, Sulistia Suwondo, dan Ira Novianty. 2021. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah." *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, No:577–586. doi:<https://doi.org/10.35313/iarj.v1i3.3246>.
- Hartati, Andi, Hery Costantia, Enita Binawati, Siti Aisyah, Helda Marlin, Renya Rosari, Charli Sitingjak, dan Yudith Febrianty. 2022. *PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK: TEORI DAN APLIKASI*. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA.
- Lirida, Mirna, Rice Haryati, dan Delory Nancy. 2023. "Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi* Vol. 1, No. doi:<https://doi.org/10.31933/epja.v1i3>.
- Mansur, Ahmad, Susilawati, dan Warman Suryaman. 2023. "Pengaruh manajemen kinerja terhadap peningkatan kinerja pengelola di UPTDBBIATKota Cimahi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Volume 5,. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3731/3065>.
- Nurkholis, dan Moh Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Pemerintah Pusat. 2004. *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. INDONESIA.
- Peraturan Pemerintah (PP). 2006. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP). 2021. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Industri Wijayakusuma*. Indonesia.
- Peraturan Presiden (Perpres). 2014. *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Rusdiana, A. and Nasihudin, Nasihudin. 2018. *AKUNTABILITAS KINERJA PENELITIAN*. diedit oleh E. Dulwahab dan N. Tresna. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif*. Cetakan 3. Bandung:Alfabeta.